



Dinamika Kebijakan Ekonomi Turki di Era Kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan : Kajian Literatur

Mira Yuli ^{1*}, Septia Arum Ningsih ², Mohammad Ridwan ³

¹⁻³ Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email: Mirayuli102@gmail.com ¹, arumsepti701@gmail.com ², ridwanciperna@gmail.com ³

*Penulis Korespondensi: Mirayuli102@gmail.com

Abstract. Turkey enjoys a strategic position as a link between Asia and Europe, and a long history stretching from the Ottoman Caliphate to its secular republic under Mustafa Kemal Atatürk. Since the victory of the Justice and Development Party (AKP) led by Recep Tayyip Erdoğan in 2002, Turkish economic policy has undergone significant changes. This study aims to analyze the development of Turkish economic policy during Erdoğan's administration, encompassing periods of economic growth, the challenges of the crisis, and the development of the Islamic financial sector. The method used is a literature review, reviewing various scientific sources, such as journals, books, and relevant research reports. The results show that during the 2002–2013 period, the Turkish economy experienced rapid growth, characterized by an increase in per capita income, a decrease in the ratio of public debt to gross domestic product (GDP), and increased foreign direct investment. However, in the 2013–2023 period, the Turkish economy faced various challenges due to geopolitical tensions, international sanctions, and unconventional monetary policies, triggering high inflation, reaching 85.5% in 2022. Meanwhile, the government continued to encourage the strengthening of Islamic finance through the development of banking participation, optimization of waqf assets, and the use of zakat as a social protection instrument. This study concludes that Erdoğan's leadership has brought significant economic transformation to Turkey, both through various achievements and challenges faced.

Keywords: Economic Policy; Economic Crisis; Erdogan; Islamic Finance; Turkiye.

Abstrak. Turki memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Asia dan Eropa serta sejarah panjang yang membentang dari masa Kekhalifahan Turki Usmani hingga menjadi negara republik sekuler di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Sejak kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin Recep Tayyip Erdoğan pada tahun 2002, kebijakan ekonomi Turki mengalami perubahan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kebijakan ekonomi Turki pada masa pemerintahan Erdoğan, mencakup periode pertumbuhan ekonomi, tantangan krisis, dan pengembangan sektor keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2002–2013, perekonomian Turki mengalami pertumbuhan pesat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita, penurunan rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PDB), serta meningkatnya investasi asing langsung. Namun, pada periode 2013–2023, perekonomian Turki menghadapi berbagai tantangan akibat ketegangan geopolitik, sanksi internasional, dan kebijakan moneter yang tidak konvensional sehingga memicu inflasi tinggi hingga mencapai 85,5% pada tahun 2022. Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong penguatan keuangan syariah melalui pengembangan perbankan partisipasi, optimalisasi aset wakaf, dan pemanfaatan zakat sebagai instrumen perlindungan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan Erdoğan telah membawa transformasi ekonomi yang signifikan bagi Turki, baik melalui berbagai capaian maupun tantangan yang dihadapi.

Kata Kunci : Erdogan; Kebijakan Ekonomi; Keuangan Syariah; Krisis Ekonomi; Turki.

1. PENDAHULUAN

Posisi geografi Turki yang terletak di antara dua benua berbeda yaitu Asia dan Eropa, merupakan sebuah keunikan sekaligus posisi yang strategis. Turki dikenal sebagai penghubung antara dunia Timur dan Barat. Sebelum tersentuh dunia barat, peradaban islam di turki membuat sultan mempunyai dua peran dimana bukan hanya sebagai pemimpin negara

tetapi sebahai khalifah. Kekhalifahan pada Turki Usmani ditopang oleh para ulama sebagai pengurus hukum syariah dan para pasukan militer (*Janissari*). (Tarbiyah et al., 2016)

Negara Turki dikenal sebagai negara sekuler yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Attaruk. Ia, berhasil menyuntikkan paham sekuler dalam tubuh negaranya. Pada tanggal 3 Maret tahun 1924 kekhalifahan di negara Turki resmi dihapus. (Junaahmadgmailcom & Junaidi, 2016)

Partai Islam Refah memenangkan pemilu di tahun 1996. Setelah itu, Erbakan berkoalisi dengan *Tance Celler* yang merupakan pemimpin Partai Tanah Air untuk menyusun kabinet baru di Turki. Pada saat itu Erdogan masih menjabat sebagai perdana menteri. Namun, masa jabatannya tergolong singkat sekitar 1 tahun. Pihak militer turki membubarkannya karena ketidaksetujuan terhadap ideologi islamis, dan Erbakan menghadapi tuntutan hukum pada tahun 1997.

Hadirlah Recep Tayyip Erdogan dan Abdullah Gul sebagai murid dari Necmekin Erbakan yang menjadi tongkat estafet untuk perjuangan Islamisasi di Turki lewat pendirian parpol berbasis islam, yaitu AKP atau Partai Keadilan dan Pembangunan pada 14 Agustus 2001. Publik merespon positif terbukti dari kesuksesan pada pemilu tahun 2002 dengan meraih 367 kursi dari total 550 kursi parlemen.

Pemerintahan *Erdagon* ini menjadikan turki menjadi salah satu kekuatan utama di Eropa yang dihormati sehingga nama *Erdogan* melambung menjadi pemimpin terbaik dunia. Pada tahun 2011 AKP memenangkan kembali pemilu sebagai perdana menteri untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Turki. Di Tahun 2014 Recep Tayyip Erdogan memenangkan pencalonan presiden di dukung oleh partai AKP pada tanggal 10 Agustus 2014. (Ibrohim & Ardiyansyah, 2024)

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena membahas bagaimana kebijakan ekonomi yang diterapkan di bawah kepemimpinan *Erdogan* mempengaruhi kondisi Perekonomian Turki, mulai dari Pertumbuhan dekonomi, krisis dan Perkembangan Keuangan Syariah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini menggunakan studi literatur yang diperoleh oleh sumber-sumber yang relevan dan terpercaya seperti buku, laporan penelitian, karya ilmiah. Metode studi literatur ialah mengumpulkan riset, mengidentifikasi, dan menganalisis sumber-sumber yang relevan. Dengan mengumpulkan hasil penelitian terdahulu yang diterbitkan dalam jurnal nasional, jurnal internasional dan skripsi melalui internet seperti *Google Sholar*, Garuda Ristekbrin dll. (Ristekbrin, n.d.)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Sejarah Politik Turki

Turki Usmani

Bangsa Turki mendirikan Turki Saljuk yang selama kurang lebih 250 tahun mengalami kehancuran. Kemudian, didirikanlah Turki Usmani. Awal mula negara usmani muncul pada tahun 699 H dan Sistem kekhalifahan mulai diterapkan pada tahun 923 H. Selama peralihan menjadi kkekhalifahan islam, dinasti ini konsisten mempertahankan syiar islam sampai masa keruntuhannya di tahun 1337 H. Pemerintah di pelopori oleh suku Oghuz dari Turki. Suku ini pola kehidupan ialah homaden berpindah- pindah termpat dari mulai ke mongol yaitu daerah utara Cina, Turki lalu berpindah ke persia dan irak. Hal ini karena mereka mencari perlindungan akibat tekanan bangsa mongol kepada saudara perempuannya ialah dinasti Saljuq yang kekuasaannya oleh Sultan Alauddin Kaikobad. Ertogul merupakan pimpinan Turki Usmani diberikan wewenang untuk memperluas wilayahnya karena berhasil membantu Sultan Saljuq menghadapi Byzantium.

Setelah Entogrol wafat kedudukannya diteruskan oleh keturunannya yaitu putra dari Entogrol yang bernama Utsman. Pada saat itu Saljuq mengalami hantaman dari bangsa mongol yang mengakibatkan dinasti tersebut terpecah menjadi beberapa dinasti kecil. Dalam keadaan itu Ustmani mengklaim kemerdekaan wilayah yang didudukinya sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Ustmani dimana Awalnya sebagai pemberian dari Sultan Saljuq. Ustman memerintah dari mulai tahun 1290 sampai 1326 M.

Usman memilih untuk memfokuskan perhatiannya dalam memperkuat fondasi kekuasaan serta membentengi wilayahnya dari berbagai ancaman dari luar. Langkah perluasan wilayah lalu dimulai dengan menbidik daerah-daerah di perbatasan Bizatium. Ia pun sukses menduduki kota pada Tahun 1317 M, dan menjadikannya sebaai ibu kota baru. Pada tahun 1326-1360 M diganti oleh putra utsman yaitu Orkhan. Diera ini lahir pasukan elit yang tangguh dengan nama Inkisyariyah atau Jannisary. Struktur militer baru ini diperkuat oleh penerusnya Lalu yaitu Murad I dengan membentuk sebuah Korps atau cabang yennisary. Pada pemerintahannya seluruh pasukan militer di latih dan di didik dalam asrama militer. Militer Yennisary ini berhasil mengubah Negara Usmany menjadi mesin perang yang paling kuat untuk menaklukan negra-negara non-muslim. Tewasnya Murad I akibat pertempuran melawan pasukan kristen maka pemerintahannya diwariskan kepada Bayazid I Tahun 1392 M. pasukannya berhasil merebut benteng Philadelpia dan Gramania atau Kirman (Iran). Oleh karena itu, kerajaan ustmani menjadi kerajaan yang besar. Namun, pada saat melawan timur

lenk Bayazid I tewas membuat pasukan melawan hampir keseluruhan wilayah Usmani jatuh Ketangan Timur Lenk.

Pemerintah Murad II yang bergelar Al- Fatih (sang penakluk) berhasil membangkitkan kembali kerajaan usmani. Ia berhasil menaklukan kota konstantinopel tahun 1453 yang sebagai ibu kota dengan nama Istanbul (tahta Islam). Selain itu, tentara ustmani menaklukan wilayah Serbia, Albania dan Hongaria. Setelah wafatnya Muhammad Al-fatih ia digantikan oleh Bayazid II yang lebih mengutamakan kehidupan tasawuf dari pada perang sehingga lemahnya pemerintahan mengakibatkan rakyat dan putranya tidak menaatinya. Pada pemerintahan Sulaiman I yang berhasil menjadikan kerajaan turki usmanani mencapai puncaknya, karena itu ia diberi gelas Al-Qanuni..(Abu, 2020)

Kemunduran Peradaban Kerajaan Turki

Kemunduran Turki Usmani bermula dari sistem birokrasi yang terlalu bertumpu pada kecakapan seorang sultan dalam memimpin roda pemerintahan. Kemunduran ini terjadi pada kerajaan turki utsmani masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni tepatnya pada Sultan Salim II.hal ini dilihat dari lemahnya prajurit Utsmani yang kalah pada pertempuran. Di tahun 1774 M, pemerintahan Sultan Abdul Hamid yang dipaksa untuk menandatangani perjanjian dengan rusia. Setelah terjadi penurunan kualitas kekuasaan kerajaan Turki Utsmani dan beberapa wilayah yang dikuasai melakukan pemberontakan dan adanya gerakan modernisasi pemerintah dari awal kerajaan menjadi republik sampai diangkatnya Mustafa Kemal Attaturk sebagai presiden pada Tahun 1924. Tiga faktor penyebab kehancuran kerajaan Turki Utsmani diantaranya :

1. Lemahnya Sistem Birokrasi dan sultannya
2. Merosotnya kondisi Sosial Ekonomi
3. Munculnya kekuatan Eropa (No Title, 2021)

Dinamika keuangan di era Ustmani melewati perjalanan penajang yang fluktuatif, berawal dari fase yang stabil hingga berujung pada inflasi serta keterpurukan ekonomi pada abad ke 19. Beberapa pilar utama dalam sistem kebijakan moneter Ustmani mencakup:

1. Pencetakan mata uang perak (akçe) dan emas (sikke), yang mendukung perdagangan domestik dan internasional, namun mengalami depresiasi seiring waktu.
2. Sistem perpajakan yang terpusat dan terorganisir, yang membantu menopang ekonomi pertanian dan perdagangan.
3. Peran strategis Utsmani dalam perdagangan internasional melalui jalur darat dan laut, menjadikan mereka kekuatan ekonomi global.

4. Inflasi dan penurunan nilai mata uang akibat tekanan dari perang dan masuknya logam mulia dari luar negeri.
5. Langkah perbaikan di sektor finansial dan mata uang yang gencar dijalankan pada abad ke 19 rupanya belum mampu mengurangi kemerosotan ekonomi Ustmani akibat impitan utang luar negeri.

Walaupun Kekaisaran Utsmani telah berupaya dalam menjaga kestabilan finansialnya, perpaduan antara kendala domestik dan tekanan global seperti konflik bersenjata yang berkepanjangan serta intervensi dari negara-negara luar, Pada akhirnya merongrong fondasi ekonomi mereka. Kondisi inilah yang memicu kebangkrutan akibat utang luar negeri yang menumpuk di awal abad ke-20.(Ilmiah et al., 2025)

Kepemimpinan Mustafa Kemal Atturk

Pada Tahun 1918 sampai tahun 1922 yang merupakan kemenangan dari gerakan perlawanan nasional dari Mustafa Kemal Pasha (Atturk) seorang pemimpin dari gerakan tersebut. di tahun 1919-1923 karier politik dari Mustafa Kemal Atturk cemerlang, dikenal sebagai perang kemerdekaan turki, menjadikannya sebagai pemimpin dan juga sebagai juru bicara gerakan nasionalisme Turki tujuannya untuk pertahanan kemerdekaan turki dari negara sekutu. Namun seiring perkembangannya gerakan ini untuk menentang Sultan.

Berdiri diatas puing-puing sisa runtuhnya kekhalifahana Turki Ustmani, sebuah Negara Republik Turki yang baru lahir. Di Bawah komando Mustafa Kemal, negara ini dibangun dengan fondasi sekularisme, modernisme, serta paham nasionalisme. Menyusul dibubarkannya sistem kesultanan dan kekhalifahan serta dideklarasikannya bentuk republik, kelompok kemalis mengambil langkah kursial untuk menerapkan sekularisasi total pada hukum keluarga. Kebijakan ini menyentuh aspek kehidupan warga sehari-hari melalui pelarangan praktik poligami atas dasar agama serta penghapusan pernikahan keagamaan. Kumpulan gagasan yang menyetai gerakan Kemalisme, atau yang dikenal sebagai Atatürkisme, terus tumbuh secara bertahap. Paham ini bukanlah sebuah ideologi tunggal yang kaku dan mencakup segala hal. Sebaliknya ia lebih tepat digambarkan sebagai kumpulan pandangan serta sikap yang tidak memiliki batasan definisi yang ketat. Nilai-nilai dasar Kemalisme kemudian diadopsi secara resmi ke dalam program kerja partai pada tahun 1931. Doktrin utama tersebut meliputi aspek republikanisme, sekularisme, nasionalisme, populisme, negaraisme, dan juga revolusionisme.(Tarbiyah et al., 2016)

Kepemimpinan Politik Recep Tayyip Erdogan di Turki

Kepemimpinan politik Recep Tayyip Erdogan di Turki tidak terlepas dari adanya dinamika pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan politik yang mempengaruhi

tatanan sosial. Sejarah mencatat bahwa dalam diskursus keilmuan terdapat tiga corak yaitu peradaban ilmu sosial seperti instrumentalisme (yang memandang ilmu sebagai alat), antroposentrisme (yang berpusat pada manusia), dan teosentrisme (yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan). menurut Auguste Comte memperkenalkan istilah “ sosiologis” sebagai cabang ilmu yang berkembang pesat. ilmu sosial ini kemudian banyak dipengaruhi oleh pendekatan positivisme yang menekankan objektivitas dan netralitas dalam memahami realitas sosial.

Positivisme memandang bahwa prosedur dan metode ilmu alam dapat diterapkan dalam ilmu sosial. Tokoh-tokoh seperti Emile Durkheim menegaskan bahwa fenomena sosial harus diperlakukan sebagai fakta yang dapat diamati secara empiris. Namun, pendekatan ini menuai kritik karena dianggap terlalu menyederhanakan realitas sosial yang kompleks. Kuntowijoyo mengemukakan gagasan ilmu sosial profetik, yaitu pendekatan ilmu sosial yang berlandaskan nilai-nilai transendental. Ilmu sosial profetik tidak hanya berhenti pada analisis empiris tetapi bertujuan melakukan transformasi sosial.

Dalam konteks kepemimpinan Erdogan, nilai-nilai keislaman menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan kebijakan publik. Kepemimpinan politiknya di pandang sebagai upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat luas dengan berpijak pada nilai moral dan spiritual. Dengan demikian, politik bukan hanya sebagai perbutan kekuasaan tapi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama serta sebagai landasan moral bagi masyarakat turki untuk membangkitkan identitas keislamannya tanpa meninggalkan aspek kemanusiaan.

Pada kepemimpinan, Erdogan dipandang berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dengan melalui penguatan ekonomi dan tata kelola negara dari mulai tahun 2002 dimana pertumbuhan ekonomi di Negara Turki meningkat secara signifikan, termasuk kenaikan PDB (Pajak Domestik Bruto). Bukan hanya itu kerjasama antar negara juga perlu khususnya Arab. Keberhasilan ini ditompang oleh manajemen sumber daya manusia, pengelolaan informasi, dan pengaturan keuangan yang efektif. Kebijakan politik Erdogan dinilai memiliki semangat pembebasan seperti mengangkat masyarakat dari keterpurukan menjadi kuat kembali dan lebih sejahtera. Lalu sikap kepemimpinannya yang santun, dan komunikatif guna memperkuat dukungan publik. (Junaahmadgmailcom & Junaidi, 2016)

Kondisi Turki melibatkan Islam dan demokrasi, bahkan proses sekularisasi juga tumbuh subur di Turki. Ketiga variabel, yakni Islam, demokrasi dan sekularisasi adalah harga mutlak bagi Negara Turki dalam menjalankan pemerintahan. Dialektika yang terjadi seperti ini mengartikan bahwa sesungguhnya Turki menerapkan sistem demokrasi sekuler tanpa menafikan ajaran-ajaran Islam didalamnya. Pemerintahan mempunyai kuasa besar dalam

mengakomodir dan mengatur berbagai permasalahan negara, baik sisi agama, politik, ekonomi dan aspek lain. Sehingga negara adalah otoritas tertinggi dalam mengambil setiap kebijakan. Dalam pandangan pos- Islamisme hal ini menjadi sebuah realita dan fenomena bahwa sisi agama juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah terkait pengambilan keputusan dalam beberapa kebijakan. Islam, Demokrasi dan sekurelasi berjalan berdampingan dalam kehidupan maupun ketika pembuatan kebijakan.(Alfikri et al., 2022)

Dinamika Kebijakan Politik Pemerintah Erdogan

Kebijakan dalam Negeri

1. memberikan gratis biaya untuk pendidikan seperti Pembiayaan Perguruan Tinggi
2. mengajarkan Al-quran dan Hadist dan kebiasaan untuk berhijab di sekolah maupun perguruan tinggi.
3. Diwajibkan untuk mengajarkan agama islam di tingkat SD sampai SMA.
4. Bahasa Arab sebagai bahasa kedua guna dapat memahami Al-Qur'an. hal ini menjadikan turki sebagai negara yang maju dengan menjadikan nilai-nilai alquran sebagai pedoman nyata dalam keberhakahan syam.

Erdogan dapat mengarahkan seluruh kebijakan politik negara berdasarkan visinya. AKP dan Erdogan ini mampu menaklukkan Militer yang saat itu menjadi king maker dan trouble maker. Sejumlah jenderal dijebloskan ke penjara, usaha militer melakukan kudeta ia gagalkan dan militer yang lain di kembalikan ke barak.

Kebijakan Luar Negeri

Dimulai dari Penolakan Turki memberikan fasilitas dan kerjasama dengan Washington untuk menginvasi Irak Tahun 2003 keputusan yang nekat dan tepat, meskipun adanya kritikan dalam mengambil kebijakan di parlemen awal maret 2003 sama halnya dengan keputusan yang diambil saat permasalahan irak.

Kebijakan untuk berpihak pada umat islam yaitu Palestina sebagai pendukung mereka dengan mengunjungi neraga-negara lain agar mengikutinya dalam untuk mendukung Palestina. Dalam diskusi internasional “ World Economic Forum” di Davos Swiss yang dihadiri oleh presiden Israel Shimon Peres, Sekjen BB Ban Ki-moon, dan Amir Moussa. Erdogan mengatakan bahwa israel adalah negara yang lebih dari pada sekedar barbar. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam aksi politik Erdogan yang berkontradiksi pada kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat yaitu :

1. Menolak untuk mendukung uapay pengucilan maupun baikot ekonomi atas Suriah Pasca-agresi militer Amerika ke Irak, termasuk insiden pembunuhan yang merenggut nyawa mantan perdana menteri lebanon, rafiq hariri.

2. Menolak pembatasan ruang gerak bagi kelompok pejuang islam Hamas, serta memilih untuk tetap menjalin komunikasi dan kemitraan formal dalam kapasitas sebagai otoritas pemerintah yang sah.
3. Tidak menyetujui pengerahan prajurit tambahan oleh militer AS menuju wilayah Afganistan.
4. Mengkritik keras sikap AS dalam memperlakukan Partai Pekerja Kurdistan yang dinilai cenderung mendapatkan proteksi sekaligus pasokan persenjataan. (Junaahmadgmailcom & Junaidi, 2016)

Dalam Konteks internasional Erdogan membuat negara Turki berhubungan baik dengan berbagai negara yang terjadi karena adanya kebijakan *Strategi depth*. Turki menjadi lebih terbuka dalam berhubungan dengan negara lain seperti negara timur tengah adalah kawasan yang geopolitiknya sama dengan Turki. Erdogan menganggap bahwa berhubungan baik antar negara akan berdampak baik untuk negara turki sehingga adanya hubungan diplomatik dengan negara mesir merupakan solusi dari masalah dalam negerinya. Sisi lain Erdogan ini seorang pemimpin yang bersedia mengambil informasi dan berdiskusi dengan dewan menteri untuk rakyat.

Sukses politik Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan

Erdogan pada saat remaja bergabung pada milli salamat Partisi dipimpin oleh Necmettin Erbakan. Pada saat itu Erdogan bertemu Erbakan sejak masih diperguruan tinggi pada Universitas Marmara studi ekonomi dan bisnis yang membuka pikirannya tentang politik. Pada tahun 1975 Erdogan menjadi Ketua Bidang Kepemudaan. Namun, partai keselamatan nasional di bubarkan sehingga Erbakan pindah ke negara Swiss.

Pasca-Kembalinya sistem demokrasi di Turki pada tahun 1983 Erdogan memutuskan untuk kembali aktif dipangggung politik lewat Partai Kesejahteraan wilayah Istanbul. Karier politik melesat saat ia dipercaya memimpin partai di kawasan metropolitan Beyoglu yang merupakan salah satu kota terbesar di Istanbul pada tahun 1984 dan setahun berselang tepatnya ditahun 1985 ia naik jabatannya menjadi pimpinan partai untuk seluruh wilayah Istanbul. Pada partai ini ia di calonkan menjadi anggota parlemen di tahun 1987 dan tahun 1991 untuk memimpin Istanbul Raya. Banyaknya prestasi yang di dapat oleh Erdogan sehingga masyarakat menjadikan ia sebagai parlemen selain itu kepawaian Erdogan Istanbul berhasil membangun Prasarana dan jalur transportasi, pengadaan airbersih, penertiban bangunan, mengurangi kadar polusi (penanaman pohon) di jalan kota. Sosok yang ia idolakan ialah Rasulullah Saw dan Necmettin Erbakan pemimpin Partai Keselamat Nasional Islam Turki.

Erdogan pada 24 juli tahun 1999 sesudah ia keluar penjara mengatakan bahwa Erdogan tidak di partai refan sekitar tahun 2001. Kemudian, Erdogan mendirikan sebuah partai yang diberi nama Partai (AKP) yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan yang tidak mencantumkan asas islam secara tegas karena hal itu di larang tetap AKP ini sudah di kenal masyarakat Turki sebagai penerus Erbakan. Ia dipenjara karena melakukan pembangkitan diskriminasi etnis atau agama di Turki melalui puisinya. Didirikannya Partai (AKP) pada tanggal 14 Agustus 2001 yang memenangkan pemilu tanggal 3 November 2002 dengan 34,1 persen suara bukan secara otomatis menaikkan citra sebagai perdana menteri. Erdogan ini di dampingi oleh Abdullah Gul yang menjadi wakil ketua pada partai AKP.

Pada saat Erdogan menjadi terpidana maka Ia digantikan oleh Abdullah Gul sebagai Perdana Menteri. Tahun 2003 di tanggal 12 Maret Erdogan bebas dan menjadi perdana menteri kembali. Recep Tayyip Erdogan berhasil menjadi pimpinan partai dibuktikan atas kemenangan terus-menerus menjadikan Abdullah Gul sebagai presiden dan Erdogan menjabat sebagai perdana menteri kembali (pemimpin terbaik dunia).

Turki melakukan pemilihan umum secara langsung untuk pertama kali setelah 91 tahun di tanggal 10 Agustus Tahun 2014. Terdapat tiga kandidat pilpres yaitu Erdogan, Ekmeleddin Ihsanoglu (sekertaris jenderal) Organisasi Konferensi Islam Sejak 2005, dan Selahattin Demirtas (Politisi) Etnis Kurdi di Turki. Erdogan memenangkan pemilu yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2014 sebagai presiden yang ke 12, Ia memperoleh 52 persen. Pada tanggal 28 Agustus Erdogan dilantik yang akan mengantarkan Turki pada Era baru. Gagasan dan aktivitas Erdogan sebagai Ijtihad dakwah di ranah Politik.

Memiliki Pemikiran Dakwah

Keberanian Erdogan Membaca kutipan bait puisi penyair Ziya Gokalp yaitu “ *Masjid adalah barak kami, kubah adalah penutup kepala kami, menara adalah bayonet kami, orang-orang beriman adalah tentara kami, tentara ini yang menjaga agama kami.* ” Akibat syair itu Erdogan dipenjara selama 10 bulan. Ia menuju penjara diiringi 500 mobil kemudian berpidato “ seorang mukmin kebahagiaannya akan tampak di wajahnya, dan kesedihannya ada dalam hatinya”. Dalam politik moderatnya Erdogan selalu menjaga hubungan dengan berbagai kelompok karena didasari pada kecerdasan politiknya.

Gerakan dakwa berpolitik

Dakwah-dakwah Erdogan adalah dapat merasakan kebutuhan, dekat dan peduli kepada kaum fakir miskin dan dhuafa. Ia merupakan strategi dakwah Rasulullah Saw pada masa awal Penyebaran Islam .pada saat menjadi wali kota istanbul sosok Erdogan ini dikenal sebagai sosok penolong bagi orang miskin dan yang membutuhkan. Saat berpidato Erdogan

menyelipkan dalil- dalil Al-Qur'an dan Hadis dan ia masih tinggal di rumah yang sederhana. Erdogan juga mampu melunasi hutang hutang kota yang besar dan mendapatkan keuntungan serta investasi sebesar 12 milyar dollar dengan begitu kota istanbul ini mengalami pertumbuhan yakni 7 %.

Era Keemasan Ekonomi Turki

Periode kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan bersama dengan partai AKP sejak tahun 2002 ditandai oleh adanya agenda reformasi ekonomi yang berhasil pada pertumbuhan ekonomi. pemerintah melakukan disiplin fiskal secara ketat agar dapat memulihkan kepercayaan pasar global, penataan ulang regulasi makro ekonomi, dan restrukturisasi perbankan yang saat itu sempat lumpuh akibat krisis finansial di tahun 2001. Keberhasilan ini menciptakan arus investasi asing langsung Foreign Direct Investment (FDI) kondusif. Langkah lainnya seperti privatisasi Badan Hukum Milik Negara yang tidak efisien dan penguatan lembaga keuangan sukses untuk ekspansi ekonomi nasional yang berkelanjutan.(Babacan, 2021)

Pada periode 2002 hingga 2013 total pendapatan perkapita melonjak hampir tiga kali lipat dari USD 3.500 menembus hingga angka USD 10.000 di akhir tahun 2013. Pemerintah berkomitmen untuk mengelola anggaran negara yang sehat, dengan begitu terdapat penurunan rasio utang publik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan level kursial 74% menjadi 36%. Puncaknya pada pertengahan tahun 2013 ketika turki melunasi seluruh sisa hutang luar negeri kepada International Monetary Fund (IMF) yang menjadi simbol kekuatan ekonomi di kawasan Euto-Asia. (Albek et al., 2023)

Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini dari stabilitas politik domestik dan prediktibilitas regulasi yang konsisten dan solid di bawah kepemimpinan institusional AKP. Terdapat kepastian hukum dan komitmen yang berhasil menghilangkan persepsi risiko tinggi terhadap pasar turki. Investor global dan pelaku uaha lokal menciptakan efek pengganda yang mendorong akumulasi kapital, peningkatan produktivitas faktor total dan penguatan daya saing industri manufaktur di pasar internasional.(Cakir & Kucukkocaoglu, 2022)

Guncangan Ekonomi dan Krisis 2013-2023

Tahun 2013- 2023 ekonomi mengalami ketidakstabilan dan krisis panjang akibat dari gejolak geopolitik, ketegangan politik dalam negeri, dan pembengkakan defisit (*Current Account Deficit*). Guncangan ekonomi semakin parah karena ketergantungan turki terhadap akumulasi Hutang luar negeri jangka pendek dan arus modal asing spekulatif yang tinggi.(Orhangazi & Yeldan, 2021)

Krisis ekonomi berkepanjangan di negara turki di sebabkan oleh sanksi internasional dari hubungan bilateral dengan ametican serikan serten unieropa menjadi protret nyata bagaimana camput tangan pihak liar mampu mengguncang ketahanan finansia suatu negara. Khususnya bagi negara yang punya kererikatan ekonomi dan diplomasi yang kuat dengan pihak pemberi sanksi. Gelombang sanksi pertama pada tahun 1018 memicu kejatuhan nilai mata uang lira secara drastis. Momentum ini menjadi awal dari krisis keuangan yang kian meluas pada tahun-tahun berikutnya. Saksi selanjutnya ialah tingkat inflasi dan nilai tukar yang mengakibatkan penurunan stabilitas makroekonomi. Hal ini menambah keadaan ekonomi turki semakin memburuk dan stabilitas makro ekonomi terus menurun.

Tekanan luar berupa boikot ekonomi akan terasa jauh lebih memukul jika negara sasarannya memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada aspek invetasi, perdagangan hingga teknologi mitra asingnya. Keretikatan inilah yang memicu kerentanan sistematikk sehingga negara tersebut mudah goyah saat terjadi ketergangen politik atau benturan kepentingan di kancah global. Dalam posisi turki, kedekatan historis, geografi, serta jalinan ekonomi degan blok unieropa dan amerika serikat membuatnya menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kebijakan embargo ini. Efek domino yang dihasilkan tidak lagi sekadar menjadi gertakan politik di atas kertas, melainkan langsung menghantam sektor riil masnyarakan. Pumcaknya, angka inflasi di turki meroket tajam hingga menyentuh angka 85,5% pada tahun 2022, sebuah persentase yang merefleksikan potret krisis finansial yang sangat masif. (Angela et al., 2025)

Otoritas Moneter Turki menerapkan Pendekatan “ unorthodox” dengan memangkas suku bunga acuan terus menerus ditengah lonjakan inflasi yang sedang terjadi. Hal ini memicu ketidakpastian pasar yang masif, mempercepat devaluasi mata uang lokal, menghambat kinerja investasi rill, dan memicu kenaikan tingkat pengangguran di sektor utama. Ini,terjadi karena kebijakan moneter yang tidak biasa. (Arbaa et al., 2022)

Di tahun 2021 sampai 2023 guncangan ekstrem yang mengakibatkan lumpuhnya daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas sosio-ekonomi nasional. Keadaan inflasi sempat mencapai angka di atas 70 % menjadi bukti dari reformasi institusional ketat menuju kebijakan ekonomi populasi mengubah turki menjadi salah satu pasar negara berkembang dengan tingkat kerentanan finansial tinggi di dunia.(Cinar & Kose, 2023)

Upaya Presiden Turki Recep Erdogan memperkuat ekonomi negeri menjelang pemilihan umum lokal yang berlangsung pada 31 Maret 2019. Delapan bulan upaya yang dilakukan pemerintah dengan berlakunya kontrol harga, para pemberi pinjaman di paksa untuk menjaga kredit yang diberikan dan melarang penggunaan dolar AS pada beberapa kontrak

kerjasamanya. Presiden turki melakukan investigasi kepada beberapa bank asing karena terjadinya penurunan mata uang lira dari hasil laporan yang diterima. Menurut Cristin Maggio, kepala riset emerging market di TD Securities, London, mengatakan bahwa “ ini semua merupakan langkah yang bertentangan dengan gagasan ekonomi pasar dimana pemerintah terlalu banyak campur tangan”.

Nilai saham dan obligasi pemerintah langsung anjlok setelah penguasa mencoba mengendalikan gejolak valuta asing. Kebijakan ini diambil demi menahan kejatuhan mata uang lira, beberapa hari menjelang pemilu kursial yang mempertaruhkan legitimasi rezim Erdogan. Akibatnya bunga transaksi offshore overnight swap melesat melebihi 1.000% lantaran industri perbankan domestik ditekan untuk menyetop suplai likuiditas bagi para manajer investai asing yang berspekulasi melawan lira. Meskipun begitu nilai mata uang turki ini tetap merosot mendekati angka 2%.

Saat resesi ekonomi di Turki mulai mereda setelah kejatuhan mata uang pada musim panas sebelumnya serta maraknya aksi jual di pasar domestik, tantangan yang dihadapi justru kian berat. Turki sangat bertumpu pada suntikan dana asing guna mendanai pertumbuhan ekonominya yang disokong oleh perluasan kredit sepanjang 2016-2017. Pada lini waktu tersebut, alian modal portofolio yang masuk menyentuh rerata US 1,3 miliar tiap bulannya, sementara neraca transaksi berjalan terus merosot hingga mengalami defisit memasuki tahun lalu para pemodal berbondong-bondong menjual aset Turki mereka, yang memicu fenomena pelarian modal secara masif. Kondisi ini terus terjadi selama delapan bulan berturut-turut sebelum akhirnya berada di posisi yang stabil. Belakangan ini otoritas Turki kian mengguncang sentimen pasar dengan membatasi akses perbankan internasional terhadap mata uang lira yang diperlukan untuk menutup kontrak swap mereka. Kebijakan ini menyulitkan para pelaku perbankan untuk berspekulasi pada lira atau menarik diri dari strategi investasi carry trades. Strategi ini umumnya dipakai guna meraup profit dari selisih margin suku bunga. Dampak lanjutannya, biaya operasional bagi investor yang mengonversi valas ke lira dalam jangka waktu tertentu melonjak tajam hingga menyentuh angka 1000% dari yang awalnya hanya berkisar di angka 23%%.(Ibrohim & Ardiyansyah, 2024)

Kebijakan Ekonomi Islam

Pemerintah Turki instrumen keuangan syariah masuk kedalam sistem keuangan negara yang sengaja dibuat netral secara sekuler yaitu istilah *Participation Banking*. upaya ini diambil supaya kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak berbenturan dengan undang-undang sekuler negara, dan tetap berjalan sesuai hukum syariat. Menurut dokumen rencana strategis Turkey Participation Banking Strategy Update Report tahun 2021-2025 bahwa pemerintah turki

menargetkan perbankan untuk merebut pangsa pasar sampai 15% seluruh aset bank. Dalam mencapai target tersebut pemerintah mendirikan bank syariah milik negara yang memberikan intensif pajak untuk produk bebas bunga, dan menerbitkan obligasi syariah (sukus) secara gencar guna membiayai proyek infrastruktur sekaligus menarik modal dari investor Timur Tengah (TKBB, 2021)

Zakat di negara turki berjalan secara independen tanpa ada campur tangan langsung dari birokrasi pemerintah. Belum adanya hukum secara resmi untuk mengurus zakat, melainkan menyerahkan proses pengumpulan dan penyaluran langsung kepada kesadaran masyarakat serta organisasi non-pemerintah. Pemerintah tetap mendukung skema tersebut dilihat dari kebijakan fiskal (tax deductible) dimana setiap masyarakat yang menyalurkan zakat atau donasi melalui yayasan kemanusiaan resmi, yang akan dihitung sebagai pengurangan beban pajak penghasilan tahunan mereka. Strategi ini berhasil menggerakkan jaring pengaman sosial tanpa mengurangi anggaran belanja negara. (Firmansyah & Nasution, 2022)

Sementara urusan wakaf dalam hukum turki sudah kuat di bawah direktorat Jenderal Wakaf. Pemerintah turki mengelola aset-aset wakaf dari warisan kesultanan Ustman seperti tanah, atau bangunan bersejarah menjadi ladang bisnis untuk memperoleh keuntungan. Aset tersebut diubah menjadi perkantoran, perhotelan, sampai pariwisata modern. Keuntungannya digunakan secara mandiri untuk membiayai fasilitas publik seperti rumah sakit, universitas dll. Dari wakaf ini pemerintah turki berhasil menciptakan bantuan anggaran yang nyata telah mengurangi beban belanja sosial pada APBN. (Sari & Rahman, 2024)

4 KESIMPULAN DAN SARAN

Di bawah pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan dan Justice and Development Party yang mulai berkuasa pada tahun 2002, perekonomian Turki mengalami perkembangan yang signifikan. Pada dekade pertama pemerintahannya, berbagai kebijakan seperti penataan fiskal, reformasi sistem perbankan, privatisasi perusahaan milik negara, serta peningkatan arus investasi asing berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, menaikkan tingkat pendapatan masyarakat, dan mengurangi beban utang pemerintah.

Memasuki periode 2013–2023, kondisi ekonomi Turki menghadapi tantangan yang lebih kompleks, ditandai dengan lonjakan inflasi, melemahnya nilai tukar lira, serta menurunnya kepercayaan pasar akibat kebijakan moneter yang kontroversial dan berbagai tekanan dari luar negeri. Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya memperkuat sektor keuangan syariah melalui pengembangan perbankan partisipasi, pemanfaatan wakaf secara

produktif, dan optimalisasi zakat sebagai instrumen pendukung kesejahteraan ekonomi nasional.

Hasil penelitian ini menghasilkan sejumlah masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah, akademisi, maupun negara berkembang. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan moneter dijalankan secara profesional dan bebas dari tekanan politik sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga. Selain itu, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim dapat memanfaatkan instrumen ekonomi Islam, seperti perbankan syariah, zakat, dan wakaf produktif, sebagai sumber pembiayaan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, S. (2020). Al-Dzahab Vol. 1 (1) 2020. *Al-Dzahab*, 1(1), 53–71.
- Albek, Baris, Akin, & Murat. (2023). The Source of Economic Growth in Turkey. *Journal of Economic Studies*, 50(5).
- Alfikri, L. R., Sahide, A., Studies, I. I., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, U. M. (2022). *JIPSi*. XII(1), 49–60.
- Angela, T., Fretes, C. J. De, Octavianus, R., Seba, C., & No, J. D. (2025). *KRISIS EKONOMI TURKI 2019-2024 STUDI KASUS : SANKSI AS DAN EROPA TERHADAP EKONOMI TURKI*. 4(1), 27–35.
- Arbaa, Othman, Varon, & Esra. (2022). Turkish Lira crisis and its impact on sector returns. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 34(1).
- Babacan, A. (2021). The Political Economy of Turkey's Economic Growth : Reform, Success, and Challenges. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 23(4).
- Cakir, N., & Kucukkocaoglu, G. (2022). The Last Twenty Years of Economic Growth in Turkey (2000-2020). *Ekonomi Bilimleri Dergisi*, 14(2).
- Cinar, K., & Kose, T. (2023). Economic Crises in Turkey and Pathways to the Future : A Decade of Turmoil. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 25(2).
- Firmansyah, A., & Nasution, H. (2022). Management of Zakat and Waqf in Malaysia and Turkey. *Iitizam Journal of Sharia Economic Research*.
- Ibrohim, M., & Ardiyansyah, F. (2024). Jurnal Humaniora dan Sosial Sains. *Humaniora dan Sosial Sains*, 1(3).
- Ilmiah, J., Syariah, K., & P-issn, E. (2025). *Eco-Iqtishodi Sejarah Kebijakan Moneter di Dunia Islam : Periode Umawiyah*. 6, 115–140.
- Junaahmadgmailcom, I. Y. E., & Junaidi, A. (2016). *Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer* Pendahuluan Turki merupakan sebuah negara yang sebelumnya lebih dikenal sebagai negara sekuler , hal tersebut tidak lepas dari sekuler di negara yang menjadi perbatasan antara Asia dan untuk membawa Turki menjadi lebih baik , 3 sejajar dengan. 6(1), 142–200.

No Title. (2021).

Orhangazi, O., & Yeldan, A. E. (2021). The Re-making of the Turkish Crisis. *Development and Change*, 52(3).

Sari, M., & Rahman, A. (2024). Analisis Relevansi Tata Kelola Wakaf di Turki Sebagai Komparasi Global. *Journal of Islamic Economics*.

Tarbiyah, F., Serambi, U., & Aceh, M. B. (2016). *E-ISSN 130 | Tabrani : Perubahan Ideologi Keislaman ... □ Jurnal Edukasi Vol 2 , Nomor 2 , July 2016 Tabrani : Perubahan Ideologi Keislaman ... | 131 Jurnal Edukasi Vol 2 , Nomor 2 , July 2016 □. 2(July), 130–146.*

TKBB, A. G. : (2021). *Turkey Participation Banking Strategy Update Report 2021-2025.*